

TAHUN 2023

RENCANA KERJA BADAN P2SDM





**RENCANA KERJA BADAN
PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
TAHUN 2023**





BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : SK.29/P2SDM/SET.11/REN.0/12/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan khususnya terkait penyuluhan dan pengembangan SDM LHK perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

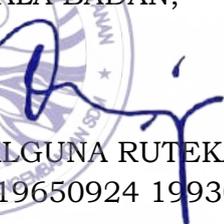
16. Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174).
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahn, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253).
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;
21. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 – 2024; dan
22. Keputusan Menteri LHK Nomor SK 1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2023.

KESATU : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan P2SDM ini.

- KEDUA : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2023 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.
- KETIGA : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2023 ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja Eselon II dan UPT lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2023 merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2023, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2022
Plt. KEPALA BADAN,

A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA NOMOR : SK.29/P2SDM/SET.11/REN.0/12/2022

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2023

PENGANTAR

KEPALA BADAN P2SDM

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengangkat tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kementerian pun mengusung tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 yaitu “Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia”. Sebagai bagian dari Kementerian LHK, Badan P2SDM akan berupaya melaksanakan program, dan kegiatan pada Tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan produktivitas lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dari sisi Sumber Daya Manusianya.

Penyusunan Rencana Kerja BP2SDM tahun 2023 didasarkan pada Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (revisi); Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2023 yang tetap menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Pada Tahun 2023, Badan P2SDM masih masuk ke dalam tiga program yaitu “Program Dukungan Manajemen”; “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” dan “Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”. Sesuai dengan perubahan arsitektur kinerja akibat adanya perubahan organisasi pada Kementerian LHK maka terdapat beberapa penyesuaian indikator kinerja Badan P2SDM sebagaimana yang telah tercantum pada dokumen Renstra Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (Revisi).

Dokumen ini berisi target kinerja dan anggaran BP2SDM Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan dari tema pembangunan LHK tahun 2023. Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2023. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita untuk dapat bekerja dengan optimal, jujur, integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Jakarta, 9 Desember 2022

Plt. Kepala Badan P2SDM



A. PALGUNA RUTEKA

NIP. 19650924 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Keputusan Kepala Badan P2SDM	i
Pengantar Kepala Badan P2SDM	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Badan P2SDM	3
1.3 Sumber Daya Manusia pada Badan P2SDM	5
1.4 Pengarusutamaan	6
II. CAPAIAN KINERJA BP2SDM	8
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	8
2.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	10
III. RENCANA KERJA TAHUN 2023	15
3.1 Peta Sasaran Program	19
3.2 Indikator Kinerja BP2SDM Tahun 2023	20
3.3 Alokasi Pendanaan Badan P2SDM Tahun 2023	27
IV. PENUTUP	30
V. LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

	HAL
TABEL 1. UNIT KERJA PUSAT DAN UPT PADA BADAN P2SDM	4
TABEL 2. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2021	9
TABEL 3. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2022	12
TABEL 4. DUKUNGAN BADAN P2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023	18
TABEL 5. INDIKATR KINERJA BP2SDM TAHUN 2023	21
TABEL 6. INDIKATR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM	25
TABEL 7. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DA UPT LINGKUP BADAN P2SDM	28



DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	4
GAMBAR 2. DATA SUMBER DAYA MANUSIA BADAN P2SDM TAHUN 2021	6
GAMBAR 3. CAPAIAN IKP BADAN P2SDM TAHUN 2021	8
GAMBAR 4. REALISASI ANGGARAN BADAN P2SDM PER KEGIATAN TAHUN 2021	10
GAMBAR 5. CAPAIAN IKP BADAN P2SDM TAHUN 2022	12
GAMBAR 6. REALISASI ANGGARAN BADAN P2SDM PER KEGIATAN TAHUN 2022	14
GAMBAR 7. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 1	16
GAMBAR 8. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 3	17
GAMBAR 9. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 6	18
GAMBAR 10. PROGRAM KEMENTERIAN LHK	19
GAMBAR 11. <i>CASCADING</i> PETA ARSITEKTUR BADAN P2SDM	20
GAMBAR 12. RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BP2SDM TAHUN 2022	28



Siswa SMKKN Pekanbaru
Dokumentasi Tim Humas Sekretariat BP2SDM



I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Selama hampir 3 (tiga) tahun Indonesia dan dunia menghadapi pandemi Covid-19 dan terus berusaha memulihkan ekonomi yang terdampak akibat pandemi. Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah terus fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dan dengan berbagai kebijakan yang diambil, ekonomi Indonesia semakin hari semakin mengalami peningkatan. Tahun 2023 ini diharapkan menjadi titik balik bagi Kementerian LHK dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup ini tidak terlepas dari kontribusi SDM pengelola sumber dayanya. Mereka harus dapat bersaing secara global, dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi global. Kebijakan Pemerintah tidak hanya pada peningkatan kualitas sumber daya alamnya saja, tetapi juga pada sumber daya manusianya.

Sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2023, Makro Ekonomi Pembangunan LHK adalah:

1. Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon
2. Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk pemerataan pembangunan wilayah
3. Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNPB dan meningkatkan kualitas belanja dan sinergi pendanaan Kementerian, sebagai upaya peningkatan *value for money* termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK
4. Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu

Sejalan dengan perkembangan dinamika Peraturan Pemerintah yang terjadi di Indonesia berupa penyempurnaan arsitektur perencanaan kinerja sebagai penyesuaian kebijakan perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian LHK, mulai tahun 2023 terdapat perubahan arsitektur kinerja termasuk penyesuaian indikator kinerja pada BP2SDM tahun 2023. Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis BP2SDM Tahun 2020-2024 (Revisi), rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **“Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Berdasarkan struktur dan organisasi tata kerja Kementerian LHK pada Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDM unggul tersebut, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berperan dalam menjamin ketersediaan SDM LHK yang cukup dengan kualitas dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BP2SDM, fokus utama kegiatan yang dilaksanakan Badan P2SDM adalah penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia LHK. Pada tahun 2023 BP2SDM masih mendukung *Major Project 44-Pengelolaan Terpadu UMKM* melalui kegiatan “Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha”. Dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Pembangunan (AP) / Prioritas Nasional (PN), Badan P2SDM mendukung pada PN1, PN3 dan PN6 melalui 11 (sebelas) kegiatan.

Secara umum, langkah strategis yang dilakukan BP2SDM dalam mendukung pencapaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan masih berfokus pada peningkatan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi; peningkatan peran penyuluh dan lembaga pelatihan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas); penyempurnaan revitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan; Pengembangan SDM yang berorientasi Wirausaha Kreatif di bidang LHK; Pengembangan Gerakan Peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup pada lembaga/komunitas masyarakat maupun sekolah; serta Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Namun sebagai tindak lanjut penyesuaian arsitektur kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024 (revisi), pada tahun 2023 BP2SDM juga akan melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan melalui penghitungan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan yang telah didampingi. Penetapan nilai transaksi ekonomi sebagai indikator dalam dokumen perencanaan ini juga sekaligus dapat memotivasi Penyuluh Kehutanan pendamping dan KTH untuk dapat terus aktif mengembangkan usaha produktifnya.

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM tahun 2023 ini merupakan penjabaran rencana kerja Kementerian LHK Tahun 2023 dan rencana strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (revisi) yang berisi rincian kegiatan dan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN P2SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung oleh lima unit kerja eselon II (Gambar 1). Adapun tugas dan fungsi Badan P2SDM mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas Badan P2SDM adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan serta memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Badan P2SDM selain didukung oleh 5 unit eselon II juga didukung oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang terdiri dari 7 Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN). Rincian lokasi dan wilayah kerja masing-masing satuan kerja tercantum pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1. UNIT KERJA PUSAT DAN UPT PADA BADAN P2SDM

No	Satuan Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
A. Unit Kerja Eselon II (Pusat)			
1.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	Seluruh Indonesia
2.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	Seluruh Indonesia
3.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	Seluruh Indonesia
4.	Pusat Pengembangan Generasi LHK	Serpong	Seluruh Indonesia
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	Seluruh Indonesia
B. UPT Balai Pelatihan LHK			
1.	Balai Pelatihan LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung.
2.	Balai Pelatihan LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Balai Pelatihan LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	Balai Pelatihan LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Pelatihan LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara

No	Satuan Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
6.	Balai Pelatihan LHK Makasar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
7.	Balai Pelatihan LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
C. SMK Kehutanan Negeri			
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN P2SDM

Pelaksanaan kegiatan pada Badan P2SDM didukung oleh SDM yang berasal dari unsur pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN (Tenaga Kontrak). Pada tahun 2022 (November) terdapat 1.224 orang pegawai yang tersebar pada unit kerja Eselon II (Pusat) dan UPT lingkup Badan P2SDM.





GAMBAR 2. DATA SUMBER DAYA MANUSIA BADAN P2SDM

1.4 PENGARUSUTAMAAN

Dalam rangka mempercepat pencapaian target-target pembangunan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola terhadap faktor eksternal lingkungan, terdapat empat pengarusutamaan yang menjadi kebijakan di Kementerian LHK. Badan P2SDM sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK tersebut. Keempat pengarusutamaan tersebut saling terkait dan saling mendukung yaitu:

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) berpartisipasi di seluruh

proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan, (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Dalam hal pengarusutamaan digital, Badan P2SDM selama ini telah berupaya mengembangkan berbagai bentuk aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kemudahan akses perolehan data melalui pengelolaan website, dan berbagai pengembangan aplikasi seperti Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH), Sistem Informasi Pendamping (SIMPING), serta *Learning Management System (LMS) E-Learning*.



II. CAPAIAN KINERJA BP2SDM

2.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S.375/MK.02/2020 dan Nomor B.308/M.PPN/D/PP.04.03/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal daftar Program Kementerian/Lembaga, Program Kementerian LHK mulai Tahun 2021 mengalami restrukturisasi menjadi 6 (enam) program. Badan P2SDM mendukung ke dalam 3 (tiga) program yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Program (IKP) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun capaian IKP tahun 2021 sebagaimana gambar 3.



*Keterangan:

1. IKP SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya; SDM yang mengikuti Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK; serta lulusan tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.
2. IKP Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat dihitung berdasarkan Jumlah KTH Mandiri dan Pembentukan LP2UKS.

GAMBAR 3. CAPAIAN IKP BADAN P2SDM TAHUN 2021

Untuk mencapai target pada IKP tersebut sesuai dengan kebijakan baru pada tahun 2020, penyusunan rencana kerja untuk tahun 2021 telah mengikuti dan menyesuaikan dengan klasifikasi rincian output yang sudah ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan Badan P2SDM pada Tahun 2021 seperti tercantum pada tabel 2 berikut.

TABEL 2. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2021

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Ket. Prioritas Nasional (PN)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	Nilai SAKIP Badan P2SDM	74 Poin	80,82 Poin	109,22%	
		Level Maturitas SPIP	3	3	100,00%	
		Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	1	1	100,00%	
2	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5	5	100,00%	
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5	5	100,00%	
		Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK	1.000 Orang	1.219 Orang	121,90%	
3	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.958 Orang	3.118 Orang	105,41%	
		Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.744 Orang	2.744 Orang	100,00%	PN 1
		Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	35 Orang	35 Orang	100,00%	
		Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	1.338 Orang	1.338 Orang	100,00%	PN 1
		Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	67 Poin	68 Poin	101,21%	
4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	478 Orang	475 Orang	99,37%	PN 3
5	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	260 Lembaga	260 Lembaga	100,00%	PN 6
		SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	945 Orang	947 Orang	100,21%	
6	Peningkatan Penyuluhan	Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri	65 Unit	65 Unit	100,00%	PN 3
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)	13 Unit	13 Unit	100,00%	PN 3
		Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS	25 Unit	25 Unit	100,00%	PN 3
		Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat	1.030 Orang	1.288 Orang	125,05%	PN 3

Untuk mendukung kegiatan BP2SDM tersebut, alokasi pagu Badan P2SDM pada awal tahun 2021 adalah sebesar Rp313.243.965.000,-. Selama tahun berjalan dilakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemik Covid-19. Selama tahun 2021, terdapat empat kali penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan pandemik covid-19, penambahan pagu luncuran SBSN dan realokasi belanja 51 untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai Eselon I lain. Sehingga pada akhir tahun 2021, total Pagu BP2SDM adalah Rp266.036.666.000,- dengan realisasi Rp263.005.249.933,- (98,86%). Rincian pagu per kegiatan lingkup BP2SDM yaitu:



GAMBAR 4. REALISASI ANGGARAN BADAN P2SDM PER KEGIATAN TAHUN 2021

2.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

Badan P2SDM pada tahun 2022 mendukung pencapaian sasaran strategis 4 KLHK “Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”, melalui dukungan terhadap indikator kinerja utama KLHK yaitu “Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan”; “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK”; serta “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi”. Selain itu, Badan P2SDM mendukung Pencapaian pada tiga Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional yaitu: PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Badan P2SDM mendukung melalui 2 (dua) kegiatan dengan rincian output yaitu *Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan dan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha*; PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Badan P2SDM mendukung prioritas nasional ini

melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu *Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal, KTH Mandiri yang terbentuk, Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang, Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, Pengadaan Peralatan Sekolah, Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN), dan Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah*; serta PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Terdapat 2 (dua) kegiatan atau rincian output pada BP2SDM yang mendukung program prioritas ini yaitu *Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.*

Dalam rangka penyempurnaan arsitektur kinerja KLHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 Program pada Kementerian LHK mulai Tahun 2022 mengalami restrukturisasi menjadi 5 (lima) program dan Badan P2SDM masuk ke dalam tiga program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Pada program ini, kegiatan BP2SDM yang mendukung adalah melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM.
2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Daya Saing Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Menuju Masyarakat yang Mandiri. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan;
3. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat serta Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan, serta Pengembangan Generasi LHK. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 6 (enam) target Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:

1. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat;
2. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya;
3. Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat;
4. Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup;
5. Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan;
6. Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan; serta
7. Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Adapun capaian indikator kinerja BP2SDM tahun 2022 sampai dengan November 2022 adalah sebagai berikut.



*** Keterangan:**

1. IKP Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
2. IKP Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
3. IKP Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.
4. IKP Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dihitung berdasarkan RO KTH Mandiri yang terbentuk dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang.

GAMBAR 5. CAPAIAN IKP BADAN P2SDM TAHUN 2022

Untuk mendukung pencapaian IKP diatas, disusun 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Penyusunan rencana kerja untuk tahun 2022 masih menggunakan kebijakan penyusunan redesain sistem perencanaan penganggaran yang mengikuti dan disesuaikan dengan klasifikasi rincian output (KRO) yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaan tahun 2022, terdapat kebijakan pemerintah berupa penghematan anggaran serta pengalokasian *automatic adjustment*. Hal ini mengakibatkan terdapat kegiatan yang tidak dapat memenuhi target. Kegiatan Badan P2SDM dijabarkan melalui 24 (dua puluh empat) rincian output kegiatan.

TABEL 3. TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BADAN P2SDM TAHUN 2022

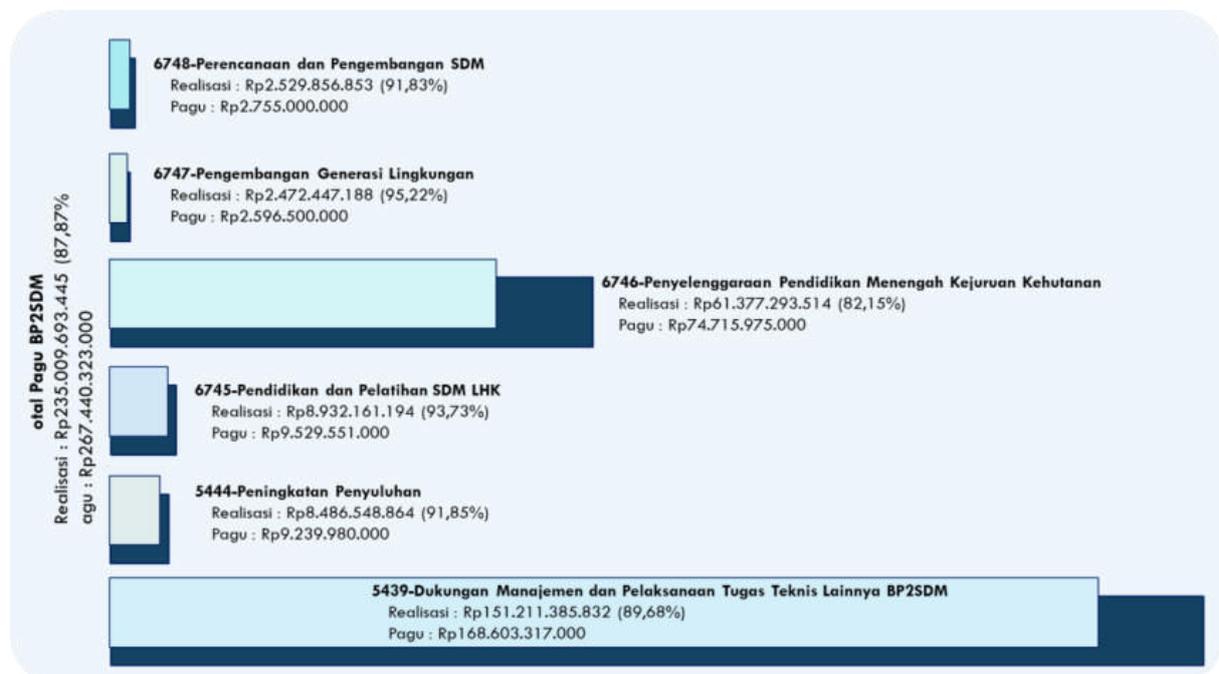
No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Rincian Output (RO)	Capaian
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (76 Poin)	71,75 Poin	Layanan Umum (12 Layanan)	12 Layanan
		Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 3)	Level 3	Layanan Sarana Internal (6 Unit)	8 Unit
		Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)	1 Dokumen	Layanan Prasarana Internal (5 Unit)	4 Unit
				Layanan Perkantoran (15 Layanan)	15 Layanan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Rincian Output (RO)	Capaian
2	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (1 Layanan)	1 Layanan
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (1 Layanan)	1 Layanan
		Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (900 Orang)	576 Orang	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK (900 orang)	576 Orang
3	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK (390 Orang)	385 Orang	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan (390 Orang)	385 Orang
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (750 Orang)	670 Orang	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan (750 Orang)	670 Orang
		Lulusan Pendidikan Karyasiswa (10 Orang)	16 Orang	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK (10 Orang)	16 Orang
		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha (660 Orang)	640 Orang	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (660 Orang)	640 Orang
		Nilai KHDTK yang dikelola (68 Poin)	74,08 Poin	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat (7 Unit)	74,08 Poin
4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (475 Orang)	470 Orang	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (475 Orang)	470 Orang
				Pengadaan Peralatan Sekolah (5 Paket)	2 Paket
				Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) (3 Unit)	3 Unit
				Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah (4 Unit)	1 Unit
5	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang peduli dan/atau berbudaya LHK (230 Lembaga)	176 Lembaga	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (215 Lembaga)	165 Lembaga
				Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (15 Lembaga)	15 Lembaga
		Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas (660 Orang)	570 Orang	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan (660 Orang)	570 Orang
6	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah KTH (KTH Mandiri) (90 Unit)	90 Unit	KTH Mandiri yang terbentuk (90 Kelompok Masyarakat)	90 Unit
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan (50 Unit)	50 Unit	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS yang terbentuk dan berkembang (50 Kelompok Masyarakat)	50 Unit
		Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (penyuluh handal) (1.700 Orang)	1.030 Orang	Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (1.700 Orang)	1.030 Orang
				<i>Forest Investment Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project (FIP-II) (300 Orang)</i>	308 Orang

Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada tahun 2022 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp284.337.418.000,- yang terbagi dalam 3 Program. Namun sesuai arahan Menteri Keuangan dilakukan pencadangan anggaran atau *Automatic Adjustment (AA)* pada belanja K/L TA 2022 sebesar 5% dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19. Badan P2SDM mengalokasikan sebesar Rp10.934.730.000 untuk pencadangan anggaran tersebut.

Pada bulan Mei 2022, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran HLN *Forest Investment Program Project II (FIP-2)*, Badan P2SDM memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp1.514.386.175,- yang bersumber dari dan Hibah Luar negeri (HLN), sehingga pagu Badan P2SDM menjadi Rp285.851.804.000,-. Berdasarkan surat Menteri Keuangan, pada bulan Mei 2022, terdapat penambahan pencadangan anggaran (AA) tahap ke-2, dimana alokasi pencadangan anggaran tahap 2 untuk BP2SDM sebesar Rp5.242.726.000,-.

Pada bulan September 2022 dilakukan realokasi belanja pegawai ke belanja barang non operasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pelatihan dasar CPNS 2022. Pada bulan Oktober 2022 realokasi atau penyesuaian belanja pegawai operasional yang berasal dari blokir AA sebesar Rp10.884.730.000,- ke BA BUN, sehingga Pagu BP2SDM menjadi Rp274.967.074.000,-. Selanjutnya pada akhir November 2022 dilakukan realokasi anggaran *automatic adjustment* dari anggaran BA 029 ke BA BUN. Sehingga pagu BP2SDM menjadi Rp267.440.323.000,-. Realisasi anggaran BP2SDM sampai dengan 2 Desember 2022 adalah Rp235.009.693.445,- (87,87%) dengan rincian capaian anggaran per kegiatan yaitu:



GAMBAR 6. REALISASI ANGGARAN BADAN P2SDM PER KEGIATAN TAHUN 2022



III.RENCANA KERJA TAHUN 2023

Mengacu pada visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI serta rumusan visi KLHK, sebagaimana tercantum dalam Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024 (revisi), visi Badan P2SDM dalam mendukung tersebut adalah “Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif, Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi Badan P2SDM, misi Badan P2SDM yang disusun dengan mengacu pada misi Presiden ke-4 serta misi KLHK adalah:

1. Meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu;
2. Merevitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan;
3. Merevitalisasi dan melakukan pengembangan sistem pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Mengembangkan pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas);
5. Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Mewujudkan generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima di BP2SDM.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

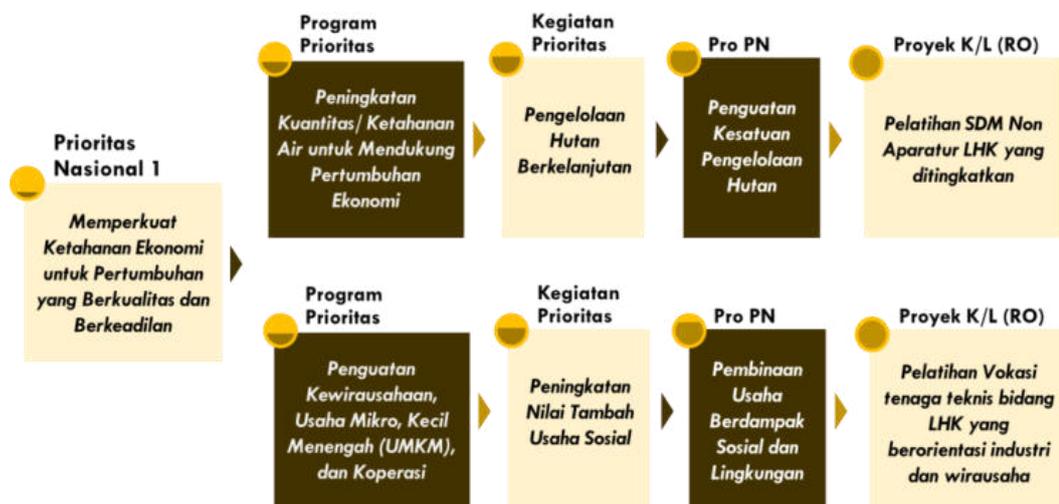
Mengacu pada Renstra BP2SDM 2020-2024 (revisi), berdasarkan optimalisasi kinerja Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) Tujuan dan sasaran strategis KLHK yaitu:

- 1) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan melalui Indikator Kinerja Program “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)” (T2.S2.1)
- 2) Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas melalui Indikator Kinerja Program “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK” (T4.S1.1)
- 3) Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien melalui Indikator Kinerja Program “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi” (T4.S2.1)

Tahun 2023, Badan P2SDM masih mendukung Pencapaian pada tiga Agenda Pembangunan (AP) / Prioritas Nasional (PN) serta 1 (satu) Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*) yaitu:

1. AP/PN-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 1 melalui kegiatan ***Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan dan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha***. Kegiatan ini merupakan kegiatan diklat atau pelatihan yang diberikan kepada SDM Non Aparatur yang langsung menangani pengelolaan hutan di tingkat tapak. Termasuk dalam kegiatan ini yaitu tenaga teknis bidang LHK yang ditingkatkan kapasitasnya dalam orientasi industri dan pengembangan wirausaha. Kegiatan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha juga mendukung ***Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM***. Sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan ini diarahkan untuk dapat mendukung semua kegiatan Kementerian LHK sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing UKE I seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; Ditjen PHLHK; Ditjen PPKL; serta BRGM.

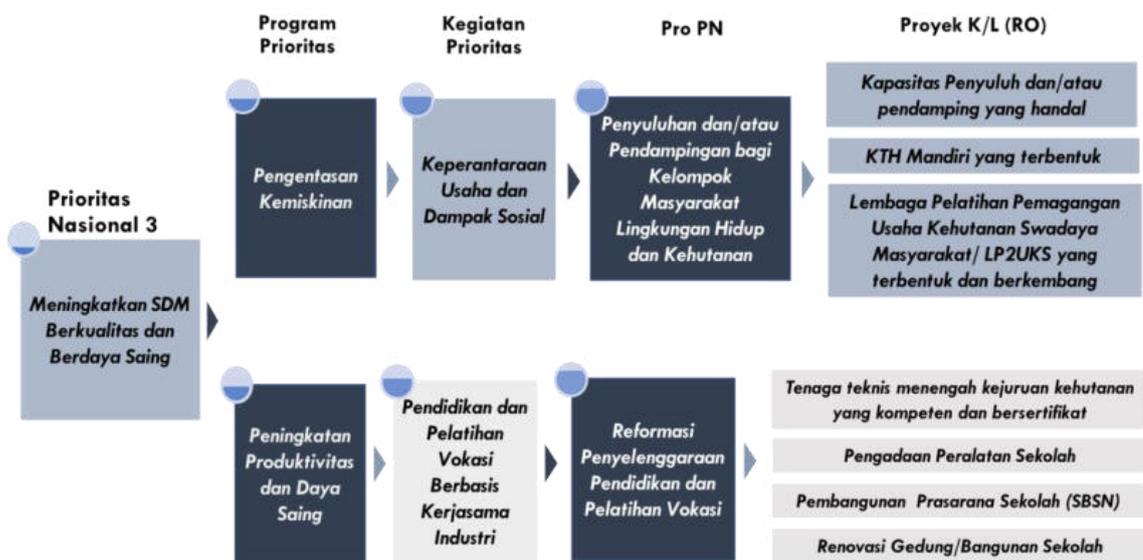


GAMBAR 7. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 1

2. AP/PN-3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Badan P2SDM mendukung prioritas nasional ini melalui 7 (tujuh) kegiatan yang secara umum terdiri dari pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Kegiatan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing KTH melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kelompok Tani Hutan selain menjadi media pembelajaran masyarakat, wadah kerjasama dan gotong royong dalam mengelola dan menjaga kelestarian alam juga menjadi pengembangan usaha komoditas yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, melalui pembinaan KTH, BP2SDM sekaligus mendukung kinerja UKE 1 lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; Ditjen PHLHK; Ditjen PPKL; serta BRGM.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan diarahkan untuk menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki kompetensi dan siap bekerja pada industri kehutanan maupun dunia usaha serta dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas SDM di tingkat tapak terutama KTH dan Kelompok Perhutanan Sosial dengan tujuan akhir meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Paket keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK ini dapat mendukung kegiatan UKE I lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; serta Ditjen PHLHK. Secara lebih rinci kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada tabel berikut.



GAMBAR 8. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 3

3. PN-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Terdapat 2 (dua) kegiatan atau rincian output pada BP2SDM yang mendukung program prioritas ini yaitu “Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan keketahanan” serta “Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan keketahanan”. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, warga sekolah ataupun anggota lembaga/komunitas dapat lebih meningkatkan kesadaran dan kapasitasnya dalam menerapkan perilaku berbudaya lingkungan hidup. Kegiatan ini khususnya mendukung pula kinerja kegiatan UKE I lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; serta Ditjen PPKL.



GAMBAR 9. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 6

Alokasi anggaran BP2SDM pada tahun 2023 yang khusus diarahkan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional dimaksud adalah sebesar Rp107.025.446.000,-. Nilai ini meningkat dibandingkan alokasi tahun 2022. Secara rinci, dukungan alokasi anggaran Badan P2SDM terhadap Prioritas Nasional 2023 tercantum pada Tabel 4 berikut.

TABEL 4. DUKUNGAN BADAN P2SDM PADA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

No.	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp)
1	PN1 - Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	5.785.000.000,-
2	PN3 - Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	107.025.446.000,-
3	PN6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.260.000.000,-
TOTAL		114.070.446.000,-

3.1 PETA SASARAN PROGRAM

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis BP2SDM 2020-2024 (Revisi), Badan P2SDM mendukung ke dalam 3 (tiga) dari 5 (lima) program Kementerian LHK yaitu:

1. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM LHK serta menyiapkan SDM LHK termasuk tenaga menengah kehutanan yang dapat langsung bekerja di bidang LHK, kelompok tani hutan dan dunia usaha guna membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan. BP2SDM dalam mendukung program ini diarahkan dalam meningkatkan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan;
3. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja KLHK. Pada program ini, kegiatan BP2SDM yang mendukung adalah melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM.



GAMBAR 10. PROGRAM KEMENTERIAN LHK

Sebagai penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM, disusun Peta Cascading Arsitektur Kinerja untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian LHK dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah disusun Badan P2SDM. Adapun secara rinci, *Cascading Arsitektur Kinerja* Badan P2SDM dapat dilihat pada lampiran dokumen.



Gambar 11. *Cascading* Peta Arsitektur Badan P2SDM

3.2 INDIKATOR KINERJA BP2SDM TAHUN 2023

Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, sesuai dokumen Revisi Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024, terdapat beberapa pemutakhiran dan optimalisasi kinerja dengan cara menyelaraskan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama, dimana terdapat 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (Sasaran Program) serta diukur keberhasilannya melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK. Sebagai tindak lanjut penyesuaian indikator kinerja KLHK, maka indikator kinerja BP2SDM juga mengalami penyesuaian. Apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja BP2SDM Tahun 2022, terdapat perubahan Indikator Kinerja yaitu meleburnya indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan peningkatan penyuluhan yang meliputi: Indikator Kinerja Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dan Indikator Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada perubahan baru, indikator kinerja yang disebutkan pada dokumen adalah “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan”.

Perubahan indikator kinerja tersebut disusun sebagai penyempurnaan muatan kinerja sebelumnya. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menjadi hasil akhir yang diukur

untuk melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Dengan kata lain, Indikator kinerja kelembagaan kelompok masyarakat dan indikator kinerja penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya masih menjadi kinerja di Pusat Penyuluhan. Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut menjadi ukuran kinerja BP2SDM. Adapun penyesuaian Indikator Kinerja BP2SDM sesuai Revisi Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

TABEL 5. INDIKATOR KINERJA BP2SDM TAHUN 2023

<i>Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK</i>	<i>Sasaran BP2SDM</i>	<i>Indikator Kinerja BP2SDM*</i>
T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (0,3 Triliun Rupiah)
T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya (2.940 Orang)
		T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (473 Orang)
		T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (69 Poin)
		T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup (247 Unit)
T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (78 Poin)

* Keterangan Indikator Kinerja BP2SDM:

1. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
3. Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

• Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

Selama ini indikator dari keberhasilan kegiatan pendampingan kelompok masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan masih sulit diukur, oleh karena banyaknya variabel dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh. Hal ini menyebabkan penetapan *corrective action* dan perbaikan-perbaikan kebijakan penyuluhan dan pendampingan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sulit

ditempuh. Sasaran utama kegiatan penyuluhan dan pendampingan yaitu meningkatkan daya saing pelaku utama dan pelaku usaha menuju masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini, yang dimaksud pelaku utama dan pelaku usaha adalah Kelompok Tani Hutan (KTH). Keberhasilan pembangunan kehutanan salah satunya ditandai dengan kelestarian hutan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kesejahteraan yang digambarkan sebagai kemampuan ekonomi yang ditandai dengan naiknya pendapatan, daya beli, tingkat pendidikan dan kesehatan. Untuk mengetahui naiknya kemampuan ekonomi masyarakat di suatu wilayah biasanya diukur dengan nilai transaksi ekonomi yang berputar di wilayah tersebut. Secara umum, transaksi ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi maupun individu yang berdampak pada perubahan atas aset atau finansial yang dimilikinya. Indikator ini juga untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku (T2.S2.1))”.

Nilai Transaksi Ekonomi KTH adalah nilai rupiah yang diperoleh dari aktivitas usaha kelompok tani hutan. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan KTH dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan pendamping KTH diharapkan dapat meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi KTH yang selanjutnya membawa dampak bagi kesejahteraan kelompok masyarakat hutan. Data Nilai transaksi ekonomi juga dapat digunakan sebagai data perkiraan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjadi masukan dalam kebijakan penyuluhan dan pendampingan. Penetapan nilai transaksi ekonomi sebagai indikator dalam dokumen perencanaan sekaligus dapat memotivasi Penyuluh Kehutanan pendamping dan KTH untuk dapat terus aktif mengembangkan usaha produktifnya.

- **JUMLAH SDM LHK YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA**

Kinerja peningkatan kompetensi SDM LHK terdiri dari pelatihan SDM Aparatur, Pelatihan SDM Non Aparatur, Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri serta pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi.

Pelatihan SDM Aparatur LHK, SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha

Peningkatan kapasitas SDM bidang LHK dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan Peningkatan kapasitas diberikan kepada SDM Aparatur LHK (ASN), pelatihan keterampilan bagi SDM Non Aparatur LHK atau SDM LHK di tingkat tapak maupun Masyarakat sekitar hutan. Selain itu dilakukan pelatihan vokasi bagi tenaga teknis bidang LHK, dimana jenis pelatihan yang diberikan adalah untuk meningkatkan kompetensi di bidang usaha kehutanan.

Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM

Dalam rangka memenuhi Sumber Daya Manusia bidang LHK yang kompeten, dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Kegiatan uji kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu : Polisi Kehutanan (POLHUT), Penyuluh Kehutanan (PK), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Pengawas Lingkungan Hidup (PLH), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) dan Non ASN.

- **JUMLAH LULUSAN SMK KEHUTANAN YANG KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT**

BP2SDM menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan yang tersebar di 5 (lima) lokasi yaitu Jawa Barat (SMKKN Kadipaten), Kalimantan Timur (SMKKN Samarinda), Riau (SMKKN Pekanbaru), Sulawesi Selatan (SMKKN Makassar) dan Papua (SMKKN Manokwari) guna memenuhi kebutuhan tenaga teknis menengah kehutanan yang handal dan profesional. Lulusan SMK Kehutanan ini sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengisi kebutuhan tenaga di sektor pemerintah, tetapi juga di dunia usaha (BUMN, swasta).

Penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan menggunakan pola *boarding school*, sehingga siswa mendapat pembinaan penuh dari sekolah selain aspek kemampuan teknis kehutanan, juga pembinaan mental dan disiplin. Melalui pelaksanaan pendidikan ini diharapkan lulusannya menjadi tenaga kerja yang kompeten dan tangguh bekerja di lapangan.

Paket Keahlian dan Kompetensi yang dihasilkan oleh lulusan SMKKN yaitu: Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH) “Kompetensi Penguji dan Pengukur Kayu Bundar”; Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH) “Kompetensi Pembuatan Peta hasil Pengolahan GPS”; Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRHH) “Kompetensi Pembuat bibit generatif”; dan Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSH) “Kompetensi Pemanduan Wisata Alam”.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan SMK Kehutanan dilakukan pengembangan metode ajar, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar, pengembangan profesi bagi guru SMK Kehutanan maupun penyusunan strategis dan sinergitas pengelolaan SMKKN.

- **INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KHDTK / HUTAN DIKLAT**

KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian, pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Badan P2SDM yang memiliki fungsi kegiatan pendidikan dan pelatihan juga melakukan pengelolaan terhadap KHDTK hutan diklat.

KHDTK hutan diklat merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat selain untuk kegiatan praktek peserta diklat, namun juga dimanfaatkan sebagai lokasi praktek siswa SMK Kehutanan dapat lebih terfokus pada suatu kawasan hutan dengan pengelolaan yang baik tanpa merubah fungsi hutan tersebut.

Sejak tahun 2020, Badan P2SDM melakukan penilaian terhadap Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat. Penilaian pengelolaan KHDTK mengacu pada PermenLHK no.7 Tahun 2021 dan Indeks Pengelolaan KHDTK akan dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu Pemenuhan Peruntukan, Efektifitas Pengelolaan serta Kontribusi terhadap Pengelolaan Hutan.

- **JUMLAH LEMBAGA/ KOMUNITAS SERTA GENERASI PEDULI DAN/ATAU BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam rangka membentuk generasi yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup, diperlukan peran aktif Lembaga masyarakat dan komunitas dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan nyata dalam aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya Badan P2SDM dalam meningkatkan peran aktif masyarakat secara masif, sistematis, terstruktur khususnya pada lembaga/organisasi/komunitas masyarakat dan sekolah yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan dilakukan melalui pembinaan gerakan masyarakat bela lingkungan (GEMILANG) untuk mendukung atau mewujudkan gerakan lembaga masyarakat dan komunitas peduli lingkungan hidup dan kehutanan serta masyarakat; dan Pembinaan atau fasilitasi kepada sekolah dalam menerapkan gerakan peduli dan/atau berbudaya lingkungan sekolah (GPBLHS) termasuk pemberian apresiasi serta publikasi pelaksanaan gerakan dan hasilnya.

- **NILAI SAKIP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berpelayanan prima, diperlukan peningkatan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Salah satunya adalah dengan penguatan akuntabilitas kinerja kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jendral KLHK untuk mengukur sejauh mana implementasi SAKIP Badan P2SDM. Selain evaluasi terhadap nilai SAKIP, dilakukan evaluasi terhadap level maturitas SPIP pada Badan P2SDM serta penyusunan laporan keuangan pada Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel.

Sebagaimana kebijakan penyusunan redesain sistem perencanaan penganggaran, indikator kinerja BP2SDM kemudian dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta didetailkan pada melalui klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) yang sudah ditetapkan. IKK dan RO Badan P2SDM telah disusun secara relevan untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan dan sasaran. Namun dengan adanya perubahan Indikator Kinerja BP2SDM, khususnya Indikator Kinerja baru “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan”, detail kegiatan untuk mencapai indikator tersebut hanya dicantumkan pada sub komponen di dalam Rincian Output KTH Mandiri. Hal ini dikarenakan penetapan Indikator Kinerja tersebut menjadi RO/ Indikator Kinerja Kegiatan di Pusat Penyuluhan belum mendapat persetujuan dalam *Trilateral Meeting* antara Kementerian LHK, BAPPENAS dan Kemenkeu sehingga belum dapat disetujui untuk menjadi Indikator Kinerja baru ataupun Rincian Output. Secara lebih terperinci IKK, KRO dan RO Badan P2SDM sebagaimana Tabel 6 berikut.

TABEL 6. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM

<i>Kegiatan</i>	<i>Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</i>	<i>Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)</i>
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
6745- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan IKK : - T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan Diklat Aparatur LHK (660 orang) - T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (690 orang) - T4.S1.1.1.1.1.3 Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (690 orang) - T4.S1.1.1.1.1.4 Lulus Pendidikan Karya Siswa (10 orang)	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan (660 Orang) Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan (690 Orang) Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (690 Orang) Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK (10 Orang)
	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan IKK : - T4.S1.1.1.1.3.1 Nilai KHDTK yang Dikelola (7 unit)	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat (7 Unit)
6746- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat IKK : - T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (473 Orang)	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (473 Orang)
		Pengadaan Peralatan Sekolah (5 Paket)
		Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) (1 Unit)
		Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah (4 Unit)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)
6747- Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya Gerakan Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan IKK : - T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat dan Komunitas Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan (247 Lembaga)	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (230 Lembaga) Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (17 Lembaga)
	T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan IKK : - T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas (610 Orang)	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan (610 Orang)
6748- Perencanaan dan Pengembangan SDM	T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK IKK : - T4.S1.1.1.1.2.1 Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (900 Orang) - T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan) - T4.S1.1.1.1.2.3 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK (900 orang)
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Dokumen)
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Dokumen)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
5444-Peningkatan Penyuluhan	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat IKK : - T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri) (30 Unit) - T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (20 Unit)	KTH Mandiri (30 Kelompok Masyarakat)
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) (20 Kelompok Masyarakat)
	T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya kapasitas Penyuluh IKK : - T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) (1.000 Orang)	Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (1.000 Orang)

<i>Kegiatan</i>	<i>Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</i>	<i>Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)</i>
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
5439-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP2SDM	T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM IKK : - T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (78 Poin) - T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 4) - T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)	Layanan Umum (12 Layanan)
		Layanan Sarana Internal (8 Paket)
		Layanan Prasarana Internal (4 Paket)
		Layanan Perkantoran (15 Layanan)

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut merupakan target BP2SDM yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan BP2SDM Tahun 2023 serta acuan penyusunan perjanjian kinerja Satker lingkup BP2SDM. Target IKK di atas selanjutnya akan menjadi dasar dalam menetapkan kinerja Satker serta Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun berjalan. Satker lingkup BP2SDM yang mendapatkan predikat "kurang berkinerja" selanjutnya akan diberikan surat untuk dapat mengoptimalkan kinerja di tahun selanjutnya. Capaian kinerja ini merupakan komitmen terhadap target pencapaian kinerja suatu organisasi yang menjadi tanggung jawab secara berjenjang mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana. Adapun kriteria penetapan kinerja sebagai berikut:

- a. Capaian IKK (Rincian Output) Satker \geq 100% maka disebut "berkinerja"
- b. Capaian IKK (Rincian Output) Satker $<$ 100% maka disebut "kurang berkinerja"

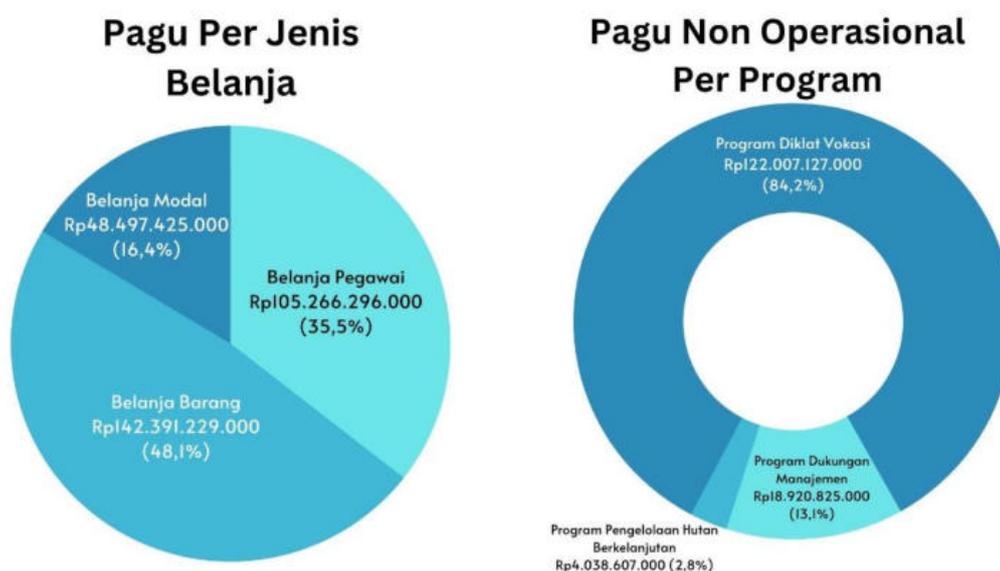
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terdiri dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OM-SPAN dan evaluasi kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga, sedangkan EKA adalah pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi terhadap capaian kinerja dan NKA ini akan dilakukan setiap triwulan sehingga diharapkan setiap Kepala Satker dapat mengawal pencapaian NKA tersebut. Sebagai apresiasi kepada satker yang memiliki nilai NKA paling baik akan diberikan sertifikat.

3.3 ALOKASI PENDANAAN BADAN P2SDM TAHUN 2023

Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tahun 2023 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp296.154.950.000,- yang terbagi dalam 3 Program dengan rincian (Gambar 10):

1. Program Dukungan Manajemen Rp170.109.216.000,-
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Rp4.038.607.000,-
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp122.007.127.000,-

Pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi termasuk di dalamnya alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp102.986.839.000,-. Selain itu di dalam anggaran pendidikan tersebut juga terdapat alokasi untuk proyek pendanaan SBSN sebesar Rp26.986.840.000,-. Alokasi anggaran Badan P2SDM per jenis belanja terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp105.266.296.000,-; belanja barang Operasional Rp45.922.095.000,-; dan belanja barang Non Operasional Rp144.966.559.000,- (Gambar 12). Alokasi anggaran Badan P2SDM per sumber dana yaitu RM sebesar Rp259.010.823.000,-; PNP sebesar Rp10.157.287.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp26.986.840.000,-. Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.



GAMBAR 12. RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BP2SDM TAHUN 2022

TABEL 7. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN PER SATKER PUSAT DAN UPT LINGKUP BADAN P2SDM

No	SATUAN KERJA	PAGU (Ribuan Rupiah)			TOTAL (Ribuan Rupiah)
		RM	PNP	SBSN	
Unit Kerja Pusat					
1	Kantor Pusat BP2SDM (Setbadan)	26.566.492	-	-	26.566.492
2	Kantor Pusat BP2SDM (Pusrenbang SDM)	2.385.000	1.200.000	-	3.585.000
3	Kantor Pusat BP2SDM (Pusat Penyuluhan)	15.263.607	-	-	15.263.607
4	Pusat Pengembangan Generasi LHK	11.306.780	1.340.000	-	12.646.780
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	25.066.156	2.332.287	-	27.398.443

No	SATUAN KERJA	PAGU (Ribuan Rupiah)			TOTAL (Ribuan Rupiah)
		RM	PNP	SBSN	
Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK)					
6	BPLHK Pematangsiantar	9.977.450	755.000	-	10.732.450
7	BPLHK Pekanbaru	10.520.376	755.000	-	11.275.376
8	BPLHK Bogor	10.571.429	755.000	-	11.326.429
9	BPLHK Kadipaten	11.791.642	755.000	-	12.546.642
10	BPLHK Samarinda	8.685.424	755.000	-	9.440.424
11	BPLHK Makassar	10.533.158	755.000	-	11.288.158
12	BPLHK Kupang	9.594.908	755.000	-	10.349.908
Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)					
13	SMKKN Pekanbaru	21.086.148	-	-	21.086.148
14	SMKKN Kadipaten	22.710.030	-	-	22.710.030
15	SMKKN Samarinda	20.494.864	-	-	20.494.864
16	SMKKN Makassar	26.324.692	-	-	26.324.692
17	SMKKN Manokwari	16.132.667	-	26.986.840	43.119.507
TOTAL		259,010,823	10.157.287	26.986.840	296.154.950



Kegiatan Praktek Siswa SMK Kehutanan
Dokumentasi Tim Humas Sekretariat BP2SDM



IV. PENUTUP

Penyusunan rencana program dan kegiatan BP2SDM Tahun 2023 merupakan upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kebijakan yang tepat dan integratif sangat dibutuhkan guna percepatan pencapaian target, oleh karena itu penyesuaian yang cepat oleh setiap satker Badan P2SDM terhadap kebijakan-kebijakan baru yang terus berkembang dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.

Badan P2SDM KLHK menyusun rencana kerja dan kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional. Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (revisi) serta kebijakan perencanaan Kementerian LHK Tahun 2023 yang telah disusun. Dokumen perencanaan ini memuat rencana kegiatan Badan P2SDM Tahun 2023 untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Badan P2SDM.

Sesuai dengan tupoksi Badan P2SDM, fokus pada penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, tidak hanya kepada Aparatur Sipil Negara tetapi juga SDM Non Aparatur atau masyarakat yang bekerja/berperan dalam pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam mewujudkan pencapaian sesuai yang diharapkan, setiap Kepala Satker agar dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, serta terus mengawal pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu diperlukan dukungan dari seluruh elemen pelaksana kegiatan Badan P2SDM untuk dapat bekerjasama secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

A group of police officers in uniform are running a race outdoors. They are wearing khaki shirts and dark green trousers. The background shows a paved area, some parked cars, and greenery.

V. LAMPIRAN

Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2023
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

PROGRAM	SASARAN DAN INDIKATOR BP2SDM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi SP: T4.S1 Meningkatkan SDM KLHK yang Berkualitas IOP: T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatkan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan IK BP2SDM: - T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya - T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat - T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan - T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK SK: 1. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Nilai KHDTK yang Dikelola (70 Poin) 2. Lulusan Diklat Aparatur LHK (660 Orang) 3. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (690 Orang) 4. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (690 Orang) 5. Lulusan Pendidikan Karya Siswa (10 Orang)	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit	2.805.000	MPI
				DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	660 Orang	3.115.288	ARG
				SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	690 Orang	3.025.000	PN1; ARG; API
					002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	690 Orang	2.760.000	PN1; ARG
				EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10 Orang	1.200.000	
		SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	473 Orang	56.334.414	PN3; AP; API		
		RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah	5 Paket	4.821.667	PN3; AP		
		RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1 Unit	26.986.840	PN3; AP		
			002-Renovasi Gedung/ Bangunan Sekolah	4 Unit	14.843.918	PN3; AP		

PROGRAM	SASARAN DAN INDIKATOR BP2SDM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran
		6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK: 1. Terwujudnya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	1. Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan/atau berbudaya LHK (247 Lembaga) 2. Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas (610 Orang)	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	230 Lembaga	780.000	PN6; API
					002-Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	17 Lembaga	480.000	PN6; API
				BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	610	1.855.000	ARG
		6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM SK: Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK	1. Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (900 Orang) 2. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan) 3. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM	900 Orang	1.400.000	
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Dokumen	800.000	
					002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Dokumen	800.000	

PROGRAM	SASARAN DAN INDIKATOR BP2SDM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan SP: T2.S2 Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan IOP: T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan IK BP2SDM: T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	5444-Peningkatan Penyuluhan SK: 1. Meningkatnya Kapasitas Penyuluh 2. Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat	1. Jumlah KTH (KTH Mandiri) (30 Unit) 2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (20 Unit) 3. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) (1.000 Orang)	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri yang terbentuk	30 Kel. Masy.	800.000	PN3; ARG	
					002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	20 Kel. Masy	700.000	PN3	
				QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	1.000 Orang	2.538.607	PN3; API	
029.WA-Program Dukungan Manajemen SP: T4.S2 Meningkatkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien IOP: T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK IK BP2SDM: T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM SK: Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (78 Poin) 2. Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 4) 3. Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 dok)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	15 Layanan	151.188.391		
					Layanan Umum	12 Layanan	17.075.825		
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	8 Paket	1.085.000		
					Layanan Prasarana Internal	4 Paket	760.000		
TOTAL								296.154.950	

Keterangan :

SP : Sasaran Strategis (Sasaran Program)
 IOP : Indikator Kinerja Program
 IK : Indikator Kinerja
 SK : Sasaran Kegiatan

KRO : Klasifikasi Rincian Output
 RO : Rincian Output
 PN : Prioritas Nasional
 AP : Anggaran Pendidikan

ARG : Anggaran Responsif Gender
 API : Adaptasi Perubahan Iklim
 MPI : Mitigasi Perubahan Iklim

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA BADAN P2SDM TAHUN 2023

Naskah dan tata letak disiapkan oleh Iman Santoso, Niken Probolaras, Dita Haristyaningrum, Rizky Dwi Harsanti, Anandita Irianti Utami, Azhuardi Rheza Fauzi dan Dede Rohman

Editor Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

**Foto dari berbagai kondisi existing kegiatan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.**

**Dokumen digital Rencana Kerja
BP2SDM Tahun 2023 ini dapat diakses
dengan memindai kode batang di
samping :**

Diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan © 2022

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14,
Jl. Gatot Subroto - Jakarta, 10270
(021) 5730131 Fax.5730131

setbp2sdm@menlhk.go.id

2023

RENCANA KERJA BP2SDM